



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 247 /PMK.01/2011 TENTANG
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA DALAM
KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI
DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA
OPERASI BEA DAN CUKAI

**MATRIK PERINGKAT JABATAN AWAK KAPAL
BERDASARKAN MASA KERJA DAN UKURAN PANJANG KAPAL**

Jabatan	Masa Kerja (Tahun)	Ukuran Panjang Kapal (Meter)/Peringkat Jabatan			
		>30	20 s.d. 30	10 s.d. 20	<10
Nakhoda/Kepala Kamar Mesin	$Y > 12$	12	12	11	10
	$8 < Y \leq 12$	12	11	10	9
	$4 < Y \leq 8$	11	10	10	9
	$Y \leq 4$	10	9	9	9
Mualim I/ Masinis I	$Y > 12$	11	11	10	9
	$8 < Y \leq 12$	11	10	9	8
	$4 < Y \leq 8$	10	9	9	8
	$Y \leq 4$	9	8	8	8
Mualim II/ Masinis II	$Y > 12$	10	10	9	8
	$8 < Y \leq 12$	10	9	8	7
	$4 < Y \leq 8$	9	8	8	7
	$Y \leq 4$	8	7	7	7
Mualim III/ Masinis III	$Y > 12$	9	9	8	7
	$8 < Y \leq 12$	9	8	7	6
	$4 < Y \leq 8$	8	7	7	6
	$Y \leq 4$	7	6	6	6
Juru Mudi I/Juru Minyak I	$Y > 12$	9	9	8	7
	$8 < Y \leq 12$	9	8	7	6
	$4 < Y \leq 8$	8	7	7	6
	$Y \leq 4$	7	6	6	6
Juru Mudi II/Juru Minyak II	$Y > 12$	9	9	8	7
	$8 < Y \leq 12$	9	8	7	6
	$4 < Y \leq 8$	8	7	7	6
	$Y \leq 4$	7	6	6	6
Juru Mudi III/Juru Minyak III	$Y > 12$	8	-	-	-
	$8 < Y \leq 12$	8	-	-	-
	$4 < Y \leq 8$	7	-	-	-
	$Y \leq 4$	6	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

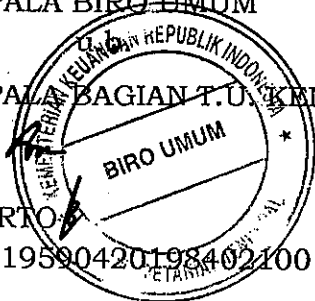
- 2 -

Jabatan	Masa Kerja (Tahun)	Ukuran Panjang Kapal (Meter)/Peringkat Jabatan			
		>30	20 s.d. 30	10 s.d. 20	<10
isi/Tukang Masak	$Y > 12$	8	-	-	-
	$8 < Y \leq 12$	8	-	-	-
	$4 < Y \leq 8$	7	-	-	-
	$Y \leq 4$	6	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 247/PMK.01/2011
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK
JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI
LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI
BEA DAN CUKAI

A. CONTOH BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN AWAK KAPAL PATROLI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH SULAWESI ...
PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B PANTOLOAN

GEDUNG, JALAN NOMOR, KOTAK POS
TELEPON; FAKSIMILE

BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN AWAK KAPAL PATROLI

Pada hari ini, tanggal 2013, bertempat di Ruang Rapat Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan, Gedung, telah dilaksanakan sidang penilaian dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi awak kapal patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh : (Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan), Pimpinan Sidang
2. Peserta Rapat :
Pejabat Penilai :
 1., Kepala Seksi....
 2., Kepala Seksi....
 3., Kepala Seksi....
 4., Kepala Subbag Umum
3. Hasil penilaian atas pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
4. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut dimaksud pada butir nomor 3, maka Pejabat Penilai akan merekomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi untuk menetapkan Keputusan tentang penetapan awak kapal patroli dalam jabatan dan peringkat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor*)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|-----------|---------|
| 1. | 1. |
| NIP | |
| 2. | 2. |
| NIP | |
| 3. | 3. |
| NIP | |
| 4. | 4. |
| NIP | |
| 5. | 5. |
| NIP | |

eterangan:

diisi Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

HASIL PENILAIAN ATAS EVALUASI AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B PANTOLOAN

Tanggal Sidang : 2013

Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT DAN GOLONGAN/RUANG	JABATAN DAN PERINGKAT SEMULA				HASIL EVALUASI
(1)	(2)	(3)	JABATAN (4)	PERINGKAT (5)	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI (6)	UKURAN PANJANG KAPAL (7)	(8)
1.	Adi Bowo/1981...	Penata Muda (III/a)	Mualim I	10	8	38	95/Baik
2.	Desi /1984...	Pengatur Tk I (II/d)	Nakhoda	12	14	38	92/Baik
3.	Doni/ 1982.....	Penata Muda (III/a)	Masinis I	8	3	28	96/Baik
4.	Rendi/1983...	Pengatur Tk I (II/d)	Mualim II	7	3	28	80/Sedang
5.	Rusdi/ 1985...	Pengatur (II/c)	Mualim II	7	3	28	70/Kurang

Pimpinan Sidang,

.....

NIP.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. REKOMENDASI PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH SULAWESI
PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TIPE B PANTOLOAN**

GEDUNG, JALAN NOMOR , KOTAK POS
TELEPON; FAKSIMILE

Nomor : SR- /BC.... /2013 2013
Sifat : Rahasia
Hal : Rekomendasi Penetapan Awak Kapal Patroli dalam Jabatan dan Peringkat

Yth. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi...
Sulawesi....

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Pejabat Penilai sebagaimana Berita Acara terlampir, Pejabat Penilai merekomendasikan Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkatnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Direkur Jenderal Bea dan Cukai.

Adapun nama-nama pelaksana yang direkomendasikan tersebut adalah:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT DAN GOLONGAN/ RUANG	JABATAN/ PERINGKAT SEMULA	HASIL PENILAIAN	REKOMENDASI	JABATAN/ PERINGKAT YANG DIUSULKAN	KET (ALASAN PERTIMBANGAN)
1.	Adi Bowo/ 1981...	Penata Muda (III/a)	Mualim I Peringkat : 10 Masa Kerja : 8 Ukuran Kapal :38	Baik	Naik	Mualim I Peringkat : 11 Masa Kerja : 9 Ukuran Kapal : 38	Hasil evaluasi kinerja Baik, masa kerja dan ukuran panjang kapal memenuhi
2.	Desi /1984...	Pengatur Tk I (II/d)	Nakhoda Peringkat : 12 Masa Kerja : 14 Ukuran Kapal :38	Baik	Tetap	Nakhoda Peringkat : 12 Masa Kerja : 15 Ukuran Kapal : 38	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, namun peringkat sudah maksimal
3.	Doni/ 1982.....	Penata Muda (III/a)	Masinis I Peringkat : 8 Masa Kerja : 3 Ukuran Kapal :28	Baik	Tetap	Masinis I Peringkat : 8 Masa Kerja : 4 Ukuran Kapal : 28	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, range masa kerja belum terpenuhi, formasi jabatan dan ukuran panjang kapal tidak tersedia
4.	Rendi/ 1983...	Pengatur Tk I (II/d)	Mualim II Peringkat : 7 Masa Kerja : 3 Ukuran Kapal :28	Sedang	Tetap	Mualim II Peringkat : 87 Masa Kerja : 4 Ukuran Kapal : 28	Hasil Evaluasi Kinerja Sedang
5.	Rusdi/ 1985...	Pengatur (II/c)	Mualim II Peringkat : 7 Masa Kerja : 3 Ukuran Kapal :28	Kurang	Tetap	Mualim II Peringkat : 7 Masa Kerja : 4 Ukuran Kapal :28	Hasil Evaluasi Kinerja Kurang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Penilai,

1. /	Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan	Pimpinan Sidang	1.
2. /	Kepala Seksi...	Anggota	2.
3. /	Kepala Seksi...	Anggota	3.
4. /	Kepala Seksi...	Anggota	4.
5. /	Kepala Subbagian Umum	Anggota	5.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

C. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL KONVERASI

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL KONVERSI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR⁽¹⁾

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN⁽²⁾

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan awak kapal patroli dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽²⁾;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁴⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁵⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal⁽⁶⁾;
2. Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian Nomor.... Tanggal⁽⁷⁾;
3. Keputusan Nomor tentang (Keputusan mengenai penetapan dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya...⁽⁸⁾

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽²⁾
- PERTAMA : Menetapkan awak kapal patroli di lingkungan⁽²⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 dan 6, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 8 dan 9 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, Keputusan..... Nomor....⁽⁸⁾ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku⁽⁹⁾.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹⁰⁾
pada tanggal⁽¹⁰⁾

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI

.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾

NIP⁽¹³⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI
BERDASARKAN HASIL KONVERSI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR /BC..../2012 TENTANG PENETAPAN
AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN
PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

A. KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI HASIL KONVERSI

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL RUANG	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	LAMA			BARU			KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(11)
1.	Adi Bowo/ 1981...	Penata Muda (III/a)	8	Mualim Kapal Tk I	9	1 Januari 2011	Mualim I	38	10	
2.	Desi /1984...	Pengatur Tk I (II/d)	14	Nakhoda Kapal	10	1 Januari 2011	Nakhoda	38	12	
3.	Doni/ 1982.....	Penata Muda (III/a)	3	Mualim Kapal Tk II	8	1 Januari 2011	Masinis I	28	8	
4.	Rendi/ 1983...	Pengatur Tk I (II/d)	3	Mualim Kapal Tk II	8	1 Januari 2011	Mualim II	28	7	
5.	Rusdi/ 1985...	Pengatur (II/c)	3	Mualim Kapal Tk II	8	1 Januari 2011	Mualim II	28	7	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

B. KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL RUANG	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Sanjay/1981...	Pengatur Muda Tk. I / II/b	5	Juru Mudi Kapal Tk I	7	1 Januari 2011	Pelaksana Tugas Belajar Tk VI	7	
	Dst....								

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI

.....(11)

..... (12)

NIP (13)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Keterangan:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR xxx/BC..../2011
- (2) Unit eselon III yang bersangkutan.
- (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (6) Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian.
- (7) Nomor dan Tanggal Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian.
- (8) Diisi SK terakhir jabatan dan peringkat pelaksana awak kapal patroli
- (9) Diisi tanggal 1 Januari 2012
- (10) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
- (11) Pimpinan unit eselon II.
- 12) Nama Pimpinan unit eselon II.
- 3) NIP Pimpinan unit eselon II.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

**D. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN
PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT**

CONTOH FORMAT

**KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM
KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR⁽¹⁾

TENTANG

PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK
JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN⁽²⁾

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan awak kapal patroli dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽²⁾;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁴⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁵⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- Memperhatikan : 1. Keputusan mengenai pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil⁽⁶⁾; atau
2. Keputusan mengenai pegawai pindahan dari Kementerian lain...⁽⁶⁾.
dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽²⁾
- PERTAMA** : Menetapkan awak kapal patroli di lingkungan⁽²⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 dan 7 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

masing-masing jabatan.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku
..... (7).

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini ini
disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal;

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini ini
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (8)
pada tanggal (8)

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI

..... (9)

..... (10)

NIP (11)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA KALI AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
BAGI CPNS BARU, PEGAWAI PINDAHAN DARI LUAR KEMENTERIAN, DAN NON AWAK KAPAL YANG MENJADI AWAK KAPAL PATROLI
UNTUK PERTAMA KALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR /BC..../2013 TENTANG PENETAPAN
PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN
DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Dodi/1981...	Pengatur/IIc	0	Mualim I	38	9	CPNS
2.	Sidiq /1984...	Pengatur/IIc	0	Mualim III	38	7	NON AWAK MENJADI AWAK KAPAL PATROLI
3.	Susanto/ 1979.....	Pengatur/IIc	0	Masinis I	28	8	PEGAWAI PINDAHAN

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI

..... (9)

..... (10)

NIP (11)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

KETERANGAN:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR xxx/BC..../2011
- (2) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (6) Diisi SK CPNS/SK mutasi dari non awak kapal patroli menjadi awak kapal patroli untuk pertama kali/ SK pindahan pegawai
- (7) Tanggal sejak TMT Pelaksana tersebut menjadi awak kapal patroli
- (8) Tempat dan Tanggal penetapan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
- (9) Pimpinan unit eselon II.
- (10) Nama Pimpinan unit eselon II.
- (11) NIP Pimpinan unit eselon II.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

E. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR⁽¹⁾**

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN⁽²⁾

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan awak kapal patroli dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽²⁾;
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁴⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁵⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal⁽⁶⁾;
 2. Surat Rekomendasi.....⁽⁷⁾
 3. Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya...⁽⁸⁾

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽²⁾
- PERTAMA :** Menetapkan awak kapal patroli di lingkungan⁽²⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 dan 7, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 10 dan 12 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, maka Keputusan..... Nomor.... ⁽⁸⁾ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku ⁽⁹⁾.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal.

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ⁽¹⁰⁾
pada tanggal ⁽¹⁰⁾

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI
..... ⁽¹¹⁾
..... ⁽¹²⁾
NIP ⁽¹³⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI
BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR /BC...../2013
TENTANG
PENETAPAN PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI
DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI
LINGKUNGAN.....

JABATAN DAN PERINGKAT AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	LAMA						BARU						KET
			MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT	TMT	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT	TMT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1.	Adi Bowo/ 1981...	Penata Muda (III/a)	8	Mualim I	38	10	1 Januari 2012	9	Mualim I	38	11	1 Januari 2013	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, range masa kerja terpenuhi		
2.	Desi /1984...	Pengatur Tk I (II/d)	14	Nakhoda	38	12	1 Januari 2012	15	Nakhoda	38	12	1 Januari 2013	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, peringkat sudah maksimal		
3.	Doni/ 1982.....	Penata Muda (III/a)	3	Masinis I	28	8	1 Januari 2012	4	Masinis I	28	8	1 Januari 2013	Hasil Evaluasi Kinerja Baik, range masa kerja belum terpenuhi, formasi jabatan dan ukuran panjang kapal		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	LAMA				BARU				KET		
			MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT	TMT	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL		PERINGKAT	TMT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													tidak tersedia
4.	Rendi/ 1983...	Pengatur Tk I (II/d)	3	Mualim II	28	7	1 Januari 2012	4	Mualim II	28	7	1 Januari 2013	Hasil Evaluasi Kinerja Sedang
5.	Rusdi/ 1985...	Pengatur (II/c)	3	Mualim II	28	7	1 Januari 2012	4	Mualim II	28	7	1 Januari 2013	Hasil Evaluasi Kinerja Kurang.....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI

..... (11)

..... (12)

NIP (13)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Keterangan:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR xxx/BC..../2011
 - (2) Unit eselon III yang bersangkutan.
 - (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
 - (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
 - (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
 - (6) Berita Acara Sidang penilaian
 - (7) Surat Rekomendasi
 - (8) Diisi SK terakhir jabatan dan peringkat pelaksana awak kapal patroli
 - (9) Berlaku surut 1 Januari
 - (10) Tempat dan tanggal penetapan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
 - (11) Pimpinan unit eselon II.
 - (12) Nama Pimpinan unit eselon II.
 - (13) NIP Pimpinan unit eselon II.
- *) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-update Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4, dan 5;
- Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

F. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI KARENA MUTASI

CONTOH FORMAT

**KEPUTUSAN PENETAPAN AWAK PELAKSANA
DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI KARENA MUTASI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR⁽¹⁾**

TENTANG

**PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN⁽²⁾**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽²⁾;
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁴⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁵⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- Memperhatikan :**
1. SK Mutasi...⁽⁶⁾ (awak kapal patroli menjadi awak kapal patroli atau non awak kapal patroli menjadi awak kapal patrol);
 2. Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya...⁽⁷⁾

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI DI LINGKUNGAN⁽²⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- PERTAMA : Menetapkan awak kapal patroli di lingkungan⁽²⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 dan 7, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 10 dan 12 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, maka Keputusan..... Nomor....⁽⁷⁾ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku⁽⁸⁾.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal;

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽⁹⁾
pada tanggal⁽⁹⁾

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI

.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾

NIP⁽¹²⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI
KARENA MUTASI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR /BC...../2013
TENTANG
PENETAPAN PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM
JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	LAMA					BARU					KET
			MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT	TMT	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT	TMT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Adi Bowo/1981...	Pengatur Muda Tk. I/ II/d	9	Mualim I	38	11	1 Januari 2013	9	Mualim I	38	11	1 Juli 2014	Dimutasi antar Pangasrops BC dengan jabatan, masa kerja, dan ukuran panjang kapal yang sama
3.	Doni/	Pengatur/ II/c	4	Masinis I	28	8	1 Januari 2013	4	Masinis I	28	8	1 Juli 2014	Dimutasi antar Pangasrops BC dengan jabatan, masa kerja, dan ukuran panjang kapal yang sama



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	LAMA				BARU					KET	
			MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT	TMT	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT		TMT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.	Deva/1984...	Pengatur / II/c	3	Non awak	-	8	1 Januari 2012	3	Masinis I	38	8	1 Juli 2013	Dimutasi dalam satu Pengastrops BC dari Non awak kapal menjadi awak kapal patroli namun pernah menduduki awak kapal patroli sebelumnya

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA

DAN CUKAI

..... (10)

..... (11)

NIP (12)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Keterangan:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR xxx/BC..../2011
- (2) Unit eselon III yang bersangkutan.
- (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
- (6) SK Mutasi
- (7) Diisi SK terakhir jabatan dan peringkat pelaksana awak kapal patroli
- (8) Diisi SPMT ybb tugas di tempat yang baru
- (9) Tempat dan Tanggal penetapan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
- (10) Pimpinan unit eselon II.
- (11) Nama Pimpinan unit eselon II.
- (12) NIP Pimpinan unit eselon II

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-update Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4, 5, dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

G. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI YANG AKAN/SEDANG/KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN PENETAPAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI YANG AKAN/SEDANG/KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR⁽¹⁾

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI YANG
AKAN/SEDANG MELAKSANAKAN/KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR DALAM
JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN⁽²⁾

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan awak kapal patroli dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽²⁾;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁴⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁵⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- Memperhatikan : 1. Surat Tugas Belajar..⁽⁶⁾
2. Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya...⁽⁷⁾;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽²⁾
- RTAMA : Menetapkan awak kapal patroli di lingkungan⁽²⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan serta peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur dan, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur dan⁽⁸⁾ sebagai Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, maka Keputusan..... Nomor....⁽⁷⁾ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku⁽⁹⁾.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal.

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹⁰⁾
pada tanggal⁽¹⁰⁾

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI

.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾

NIP⁽¹³⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT DALAM KELOMPOK JABATAN AWAK KAPAL PATROLI
KARENA MUTASI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR /BC...../2013 TENTANG PENETAPAN
PERTAMA AWAK KAPAL PATROLI DALAM JABATAN
DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

A. JABATAN DAN PERINGKAT AWAK KAPAL PATROLI YANG AKAN TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/G OL	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	LAMA			BARU			KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKURAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Adi Bowo/1981...	II/d	8	Mualim Kapal Tk I	38	9	1 Januari 2012	Pelaksana Tugas Belajar IV	9	
2.	Desi /1984...	III/b	13	Nakhoda Kapal	38	12	1 Januari 2012	Pelaksana Tugas Belajar III	10	
3.	Doni/	II/c	3	Mualim Kapal Tk II	38	8	1 Januari 2012	Pelaksana Tugas Belajar V	8	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

B. JABATAN DAN PERINGKAT AWAK KAPAL PATROLI YANG SEDANG TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	LAMA			BARU			KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Adi Bowo/1981. ..	II/d	Pelaksana Tugas Belajar IV	9	1 Juli 2012	Pelaksana Tugas Belajar V	10	1 Januari 2012	
2.	Desi /1984...	III/b	Pelaksana Tugas Belajar I	12	1 Juli 2012	Pelaksana Tugas Belajar I	12	1 Januari 2012	
3.	Doni/	II/c	Pelaksana Tugas Belajar V	8	1 Juli 2012	Pelaksana Tugas Belajar III	9	1 Januari 2012	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

C. JABATAN DAN PERINGKAT AWAK KAPAL PATROLI YANG KEMBALI TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT/ GOL RUANG	LAMA			BARU				KET
			JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	MASA KERJA SEBAGAI AWAK KAPAL PATROLI	JABATAN DAN KEDUDUKAN	UKIRAN PANJANG KAPAL	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Adi Bowo/1981...	II/d	Pelaksana Tugas Belajar IV	10	1 Januari 2014	8	Mualim Kapal Tk I	38	9	
2.	Desi /1984...	III/b	Pelaksana Tugas Belajar I	12	1 Januari 2014	13	Nakhoda Kapal	38	12	
3.	Doni/	II/c	Pelaksana Tugas Belajar V	9	1 Januari 2014	3	Mualim Kapal Tk II	38	8	

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI

..... (11)

..... (12)

NIP (13)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Keterangan:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Contoh: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR xxx/BC..../2011
 - (2) Unit eselon III yang bersangkutan.
 - (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
 - (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
 - (5) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
 - (6) Nomor dan tanggal SK Tugas Belajar.
 - (7) Diisi SK terakhir jabatan dan peringkat pelaksana awak kapal patroli
 - (8)
 - Untuk yang akan tugas belajar lajur 5 dan 6 menjadi lajur 9 dan 10
 - Untuk yang sedang tugas belajar lajur 4 dan 5 menjadi 7 dan 8
 - Untuk yang telah kembali dari tugas belajar lajur 4 dan 5 menjadi 8 dan 10
 - (9) Diisi SPMT ybb tugas di tempat yang baru
 - (10) Tempat dan tanggal penetapan Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli
 - (11) Pimpinan unit eselon II.
 - (12) Nama Pimpinan unit eselon II.
 - (13) NIP Pimpinan unit eselon II
- *) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-update Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4, dan 5;
- Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

MARTO

P 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

